

“Kompleks Tambak Rakyat” : Masa Depan Perikanan Indonesia

Dalam Kompetisi Menulis Greener Future oleh SDG Academy Indonesia

Oleh : Farah Zhafirah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia berada di posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Pasifik, dan di posisi silang antara benua Asia dan Australia, dengan luas daratan 1,9 juta km² (terdiri dari lahan darat 72%, dan perairan tawar 28%); luas perairan 6,4 juta km² (terdiri dari laut teritorial 0,29 juta km², dan perairan pedalaman - perairan kepulauan 3,11 juta km²); dan luas ZEE 3,00 juta km². Karenanya, Bapak Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional lalu menyatakan, “Indonesia adalah negara terkaya dalam hal *biodiversity* laut, untuk itu ***Sustainable blue economy* menjadi agenda yang harus diprioritaskan di seluruh wilayah pantai yang kita miliki**”. Tentu darisini kita dapat memahami bahwa negeri kita telah mewujudkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana diamanahkan dalam SDGs tujuan ke-14 (*life below water*).

Saat ini, sub sektor perikanan tangkap bertransformasi menjadi sub sektor yang cukup meresahkan. Riset menunjukkan tingkat pemanfaatan ikan di WPP NRI secara keseluruhan didominasi status *fully-exploited* sekitar 44 %, diikuti status *overfishing* sekitar 38% serta status moderat sekitar 18 %^[1] ditambah lagi *destructive fishing* yang rentan mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Disisi lain, perikanan budidaya hadir membawa nafas baru sebagai salah satu alternatif strategis yang mampu mendorong pembangunan perekonomian bangsa sekaligus keberlanjutan ekologi. Terlebih lagi, sub sektor perikanan budidaya nampaknya telah menuai perhatian lebih dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan kini menjadi dua dari tiga program prioritas KKP tahun 2021-2024 yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Trenggono ^[2].

Dengan melihat peluang ini, Indonesia mau tidak mau harus mampu memainkan peranan pentingnya sebagai negara maritim, khususnya dalam pengelolaan ikan berkelanjutan yang salah satunya berasal dari budidaya. Namun faktanya, industri budidaya Indonesia belum mencapai pada target yang maksimal baik segi ekonomi maupun ekologi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak, sistem logistik dan infrastruktur yang terbatas, kurangnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dan masih banyak isu lainnya yang perlu diperhatikan lebih jauh.

Berangkat dari poin diatas, penulis menggagas sistem pengelolaan budidaya perikanan dan pengolahan terintegrasi yang dikelola oleh rakyat dan didukung oleh pemerintah. Kompleks tambak rakyat bertujuan untuk mengembangkan potensi perikanan budidaya Indonesia agar dapat bergerak untuk kemajuan ekonomi bangsa dan keberlanjutan ekologi.

¹ Ardiyani J, Iskandar B, Wisudo S. 2019. Estimasi Jumlah Kapal Penangkap Ikan Optimal di WPP 712 Berdasarkan Potensi Sumber Daya Ikan. Bogor. Albacore Vol (3)

² Target dan Program Prioritas Perikanan Budidaya Tahun 2021 diakses pada : <https://news.kkp.go.id/index.php/target-dan-progam-prioritas-perikanan-budidaya-tahun-2021/> [Internet] [27 Juni 2021]

Tujuan Pemodelan Kompleks Tambak Rakyat Indonesia

1. Menciptakan model tambak terintegrasi dengan unit pengolahan berbasis pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi;
2. Mendesain pembangunan ekonomi biru melalui penguatan asosiasi peran pemerintah dan masyarakat.

Urgensi Masalah

Lebih dalam, permasalahan hadir melalui data sebaran kapal penangkap ikan Indonesia. Data BPS menunjukkan pada tahun 2016 tercatat 543.845 kapal^[3] yang beroperasi di setiap sudut perairan Indonesia untuk mengeksplorasi potensi perikanan sebesar 12,54 juta ton^[4] dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 10 juta ton. KKP memperkirakan pada tahun 2019 lalu, sebesar 40% dari seluruh WPPNRI mengalami *fully exploited* yang berarti jumlah hasil tangkapan melebihi jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Hal ini jauh diperparah oleh kenyataan yang disampaikan oleh Direktur Konservasi dan Jenis Ikan KKP bahwa hanya lima persen terumbu karang yang masih sangat baik, 25% terindikasi baik, dan 70% rusak^[5]. Ancaman lokal seperti *destructive fishing* dan *over fishing* menjadi pemicu utama dari kerusakan ekosistem laut kita.

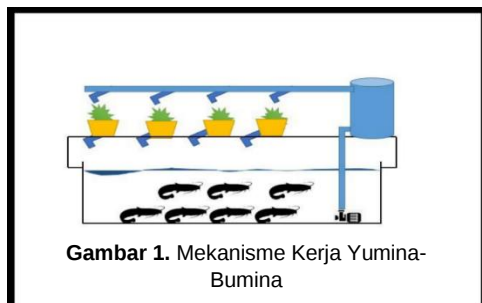
Salah satu yang dapat dikembangkan, dan sangat terbuka peluangnya adalah melalui perikanan budidaya. Namun, saat ini budidaya masih memiliki beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut seperti kelayakan skala usaha, teknis budidaya, sistem logistik dan infrastruktur, teknologi dan sistem produksi, serta aspek lingkungan.

Perlu kita ketahui bersama juga, kegiatan budidaya di Indonesia pada umumnya hanya berkonsentrasi pada kegiatan budidaya saja tanpa melakukan diversifikasi hasil panen sebelum diekspor/dijual. Padahal jika saja, seluruh kegiatan budidaya di Indonesia memiliki sistem yang terintegrasi langsung ke unit pengolahan, maka dapat dipastikan hasil ekspor perikanan dapat menjadi sumbangsih tertinggi devisa negara.

ISI

Solusi yang pernah ditawarkan

Menyoroti isu-isu ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan KKP kemudian menggagas konsep Yumina Bumina yang merupakan suatu inovasi teknologi budidaya ikan yang berbasis ketahanan pangan. Yumina Bumina sendiri merupakan singkatan dari Yumina (Yu: sayuran, mina: ikan) dan Bumina (Bu: buah, mina : ikan).



Teknologi ini memaksimalkan pemanfaatan lahan yang cenderung tetap seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan begitu, teknologi ini menjadi solusi terbaik untuk ketahanan pangan secara komunitas.

³ Pencarian Kapal Menurut Jenis Kapal, Tahun, dan Provinsi diakses pada : <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=kapal&i=5> [Internet] [27 Juni 2021]

⁴ Potensi Sumber Daya Ikan Semakin Besar diakses pada : <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/potensi-sumber-daya-ikan-semakin-besar> [Internet] [27 Juni 2021]

⁵ Manusia ancaman Terbesar Ekosistem Laut diakses pada : [Manusia Ancaman Terbesar Ekosistem Laut \(kompas.com\)](https://kompas.com) [Internet] [27 Juni 2021]

Secara umum mekanisme kerja Yumina-Bumina dimulai dari air limbah budidaya yang mengendap di dasar bak atau kolam ikan, banyak mengandung unsur N dan P yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan, unsur N dan P merupakan unsur yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Limbah ini akan terangkat oleh pompa air kemudian didistribusikan melalui pipa dan masuk ke dalam wadah pengendapan.



Gambar 2. Yumina Bumina dan Peralatannya (Dokumentasi Pribadi)

Nilai lebih dari konsep ini adalah Yumina Bumina dianggap mampu menjadi penopang ketahanan pangan komunitas terkhusus ikan. Konsep ini pada prinsipnya menawarkan kemudahan dan kehematan untuk mencukupi konsumsi ikan, buah dan sayur dalam skala rumah tangga. Namun pada kenyataannya, konsep ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya masyarakat belum sepenuhnya memiliki keinginan untuk merancang Yumina-Bumina terutama disebabkan faktor modal operasional awal yang mencapai Rp. 1.863.250^[6]. Keengganan masyarakat mungkin juga tercipta dari lamanya siklus panen untuk ikan, sayur dan buah. Minimnya masyarakat yang berpartisipasi untuk konsep tersebut maka dapat diasumsikan konsep ini belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang massif baik untuk ketahanan pangan rumah tangga maupun untuk pergerakan ekonomi nasional.

Gagasan Penulis

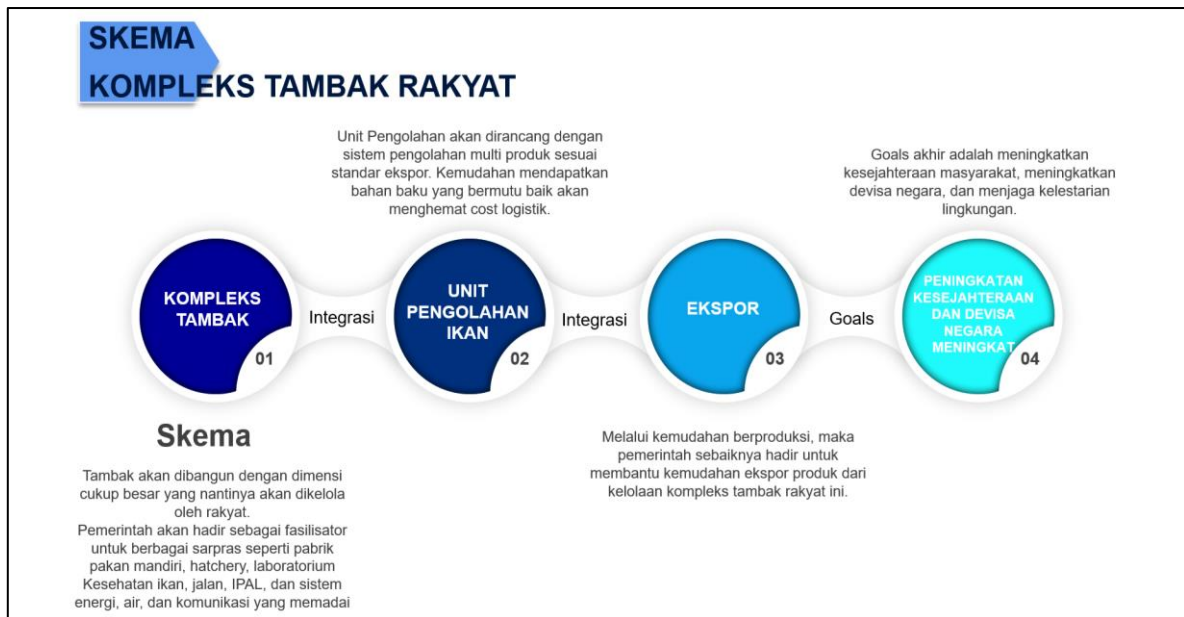
Solusi yang pernah ditawarkan pada dasarnya sangat memberikan peluang yang tinggi jika lebih difokuskan dan dibuatkan model di beberapa Provinsi sebagai percontohan. Yumina-Bumina cenderung lebih diproyeksikan untuk fokus menjaga ketahanan pangan skala rumah tangga dan belum mempertimbangkan pembangunan ekonomi secara massif.

Dalam tujuan mencapai Ekonomi Biru Indonesia yang menjunjung tinggi asas keberlanjutan, Penulis mencoba untuk mengalihkan perikanan tangkap alami di laut melalui modelisasi kegiatan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, kegiatan pembenihan, pabrik pakan, pembesaran hingga unit pengolahan yang terpadu dalam satu wilayah. Model ini diharapkan meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan *stakeholders* dalam meningkatkan produktivitas budidaya dengan tetap menjaga lingkungan.

Secara teknis, konsep ini akan terdiri atas tambak-tambak rakyat (dikelola oleh rakyat) yang tersusun rapih seperti kompleks, hatchery (tempat pembenihan), sumber energi/ power supply, gardu komunikasi, pabrik pakan mandiri, cold storage, laboratorium Kesehatan ikan

⁶ Zhafirah F, Gusdi A, Nuki N. 2019. Peningkatan Ketahanan Pangan Komunitas Pedesaan dengan Yumina Bumina Menuju Indonesia Emas 2045.

dan nutrisi pakan, IPAL, Unit Pengolahan Ikan (sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan), infrastruktur (jalan), dan Gedung siap ekspor.



Gambar 3. Skema Kompleks Tambak Rakyat

Berdasarkan skema diatas, poin yang menjadi highlight adalah pengintegrasian system hulu (budidaya) dan hilir (pengolahan), sehingga dapat dengan mudah melakukan distribusi baik ekspor maupun konsumsi domestik. Bahan baku yang akan digunakan industri pengolahan akan bermutu baik sehingga berbanding lurus pada end product. Melalui andil Pemerintah, diharapkan dapat membantu untuk akomodir secara komperhensif sarana prasarana yang akan digunakan oleh masyarakat.

Pihak-Pihak terkait dalam mengimplementasikan gagasan

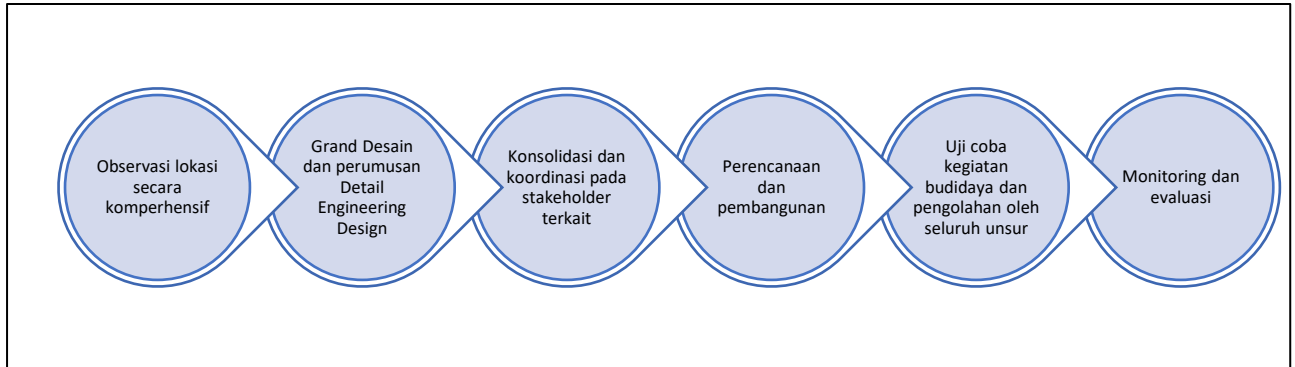
Dalam upaya merealisasikan kompleks tambak rakyat, diperlukan beberapa Kementerian/ Lembaga yang mampu mendukung dan memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kementerian/Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Para Pembudidaya, Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, dan Tokoh Masyarakat. Tugas dan wewenang dari masing-masing kementerian/Lembaga tersebut disajikan pada table berikut :

Tabel 3. Wewenang Kementerian/Lembaga

No	Stakeholder terkait	Tugas/wewenang
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Merancang grand design Kompleks Tambak Rakyat
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Berkolaborasi dengan KKP untuk mengatur tata kelola lingkungan
3.	Pemerintah Daerah	Melakukan observasi lahan dan potensi sumber daya regional
4.	BUMN PLN dan Telekomunikasi	Menjalin kemitraan untuk fasilitas listrik dan komunikasi
5.	Lembaga Non Pemerintah	Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif

Langkah-langkah Strategis dalam Mengimplementasikan Gagasan

Gagasan ini dapat dikatakan sebagai terobosan yang perlu segera dikaji mendalam dan kick-off secepat mungkin. Strategi pengaplikasian model kompleks tambak rakyat dapat dijabarkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Strategi Implementasi Gagasan

PENUTUP

Kompleks Tambak Rakyat menjadi terobosan baru untuk mewujudkan impian masa depan ekonomi biru Indonesia. Konsep ini memiliki dua kunci utama yaitu integrasi dan sinergi, yang artinya mengintegrasikan budidaya perikanan secara massif dan sistematis dengan unit pengolahan ikan untuk kebutuhan ekspor serta mensinergikan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dengan rakyat sebagai pengelola tambak dan unit pengolahan. Konsep ini diharapkan menjadi strategi terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa, dan kesejahteraan masyarakat serta tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi.

Perlu adanya kerjasama antar Kementerian/Lembaga, BUMN, dan stakeholder terkait lainnya untuk menyukseskan kompleks tambak rakyat sebagai salah satu solusi untuk ekonomi biru Indonesia. Bukankah sudah saatnya, Indonesia terkenal sebagai poros maritim dunia? Ini saatnya.